
ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF POTENSI SUMBER DAYA: STUDI KASUS KABUPATEN LEBONG SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI

Sunoto¹⁾, Bertha Iin Esti Indraswanti²⁾

^{1,2} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu,
Indonesia

¹⁾ simbahnoto@yahoo.co.id

²⁾ eindraswanti@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this research was to analyze economic development of Lebong Regency in potential resources perspective. Base on BPS secondary time series data (2017-2020), descriptive analysis was used to analyze economic development, include DLQ and SS analysis. Lebong did not depend on premier sector to growth. As a conservation region, potential resources can be explored to increase value added. Even, the labor force had low education. Leading sectors in employment absorption are sectors which unskill labor. The higher output productivity performs by secunder and tertier sectors. Lebong have carbon conservation programme, and develop tourism base on environment.

Keywords: *Economic Development, Conservation Region.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi selalu menjadi perhatian dalam setiap level pemerintahan. Perdebatan arah dan pemilihan model pembangunan tetap bermuara pada tujuan kesejahteraan masyarakatnya. Keterbatasan sumber daya sering menjadi pertimbangan utama untuk perencanaan pembangunan suatu daerah. Pilihan-pilihan dari pemanfaatan sumber daya, prioritas pembangunan dan pendekatan pembangunan menjadi tantangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Pada umumnya, pembangunan suatu daerah yang ditujukan untuk kemajuan ekonominya menentukan sector ataupun komoditas unggulan untuk mengejar kemajuan daerah lainnya.

Pemekaran daerah sejak otonomi daerah dimulai di Indonesia membuat pembangunan besar-besaran di semua daerah, terutama daerah pemekaran. Pembentukan suatu pemerintahan baru menuntut banyak hal untuk menjalankan roda pembangunan. Pembangunan infrastruktur di segala bidang, penguatan kelembagaan dan berbagai kebijakan di berbagai bidang juga diambil untuk mencapai tujuan pemekaran.

Kabupaten Lebong dimekarkan dari Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan UU No. 39 Tahun 2003. Sebagaimana kabupaten pemekaran lainnya di Indonesia, juga menginginkan

kesejahteraan penduduknya meningkat dari waktu ke waktu. Tujuan pembangunan tentu diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada potensi ekonomi atau factor produksi yang dimiliki, dan pilihan model pembangunan. Sampai tahun 2020, Kabupaten Lebong masih menjadi kabupaten dengan posisi paling bawah dalam perekonomian Provinsi Bengkulu, dengan kontribusi pada PDRB Provinsi Bengkulu sekitar 4,5%. (Tabel 1.) Menjadi kabupaten dengan nilai PDRB terrendah tentu saja membutuhkan perencanaan pembangunan yang matang.

Tabel 1. PDRB Provinsi Bengkulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota, (milliar rupiah)

Kabupaten - Kota	2014		2019		2020*	
	PDRB	Share (%)	PDRB	Share (%)	PDRB	Share (%)
Kota Bengkulu	11.627	32,27	15.342	32,98	15.301	33,02
Bengkulu Selatan	2.826	7,84	3.616	7,77	3.625	7,82
Bengkulu Utara	4.092	11,36	5.206	11,19	5.216	11,26
Kabupaten Kaur	1.752	4,86	2.261	4,86	2.264	4,89
Kabupaten Kepahiang	2.174	6,04	2.806	6,03	2.806	6,06
Kabupaten Lebong	1.665	4,62	2.125	4,57	2.127	4,59
Kabupaten Muko Muko	2.590	7,19	3.326	7,15	3.326	7,18
Kabupaten Rejang Lebong	4.755	13,20	6.080	13,07	6.083	13,13
Kabupaten Bengkulu Tengah	2.267	6,29	2.888	6,21	2.885	6,23
Kabupaten Seluma	2.280	6,33	2.871	6,17	2.870	6,19
Provinsi Bengkulu	36.029	100	46.520	100,00	46.338	100

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka Tahun 2018 dan 2021 (diolah)

Kabupaten Lebong merupakan kabupaten konservasi. Kawasan Konservasi dengan peruntukan untuk Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat 111.035,00 Ha, Hutan Lindung 20.777,40 Ha dan Cagar Alam 3.022,15 Ha. (www.lebongkab.go.id). Dengan sekitar 70% luas wilayahnya adalah kawasan konservasi, maka lahan untuk pengembangan ekonomi menjadi kendala utama. Pengelolaan lahan secara optimal, menjadi tantangan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan dan pelaksanaan fisik pembangunan menjadi sangat penting demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perencanaan untuk penetapan kawasan konservasi saat ini belum optimal, dan bersinergi dengan masyarakat, dan dampak yang paling buruk dari hal tersebut adalah munculnya beberapa pelanggaran terhadap kelestarian alam di Kabupaten

Lebong. Konsentrasi pembangunan Kabupaten Lebong saat ini fokus pada dua sisi, yaitu perencanaan pembangunan dan pelaksanaan fisik pembangunan. (www.lebongkab.go.id).

Dengan keterbatasan lahan untuk budidaya, perencanaan pembangunan memiliki tantangan yang jauh lebih sulit dibanding kabupaten lainnya di Bengkulu, karena dilema pemanfaatan sumberdaya untuk kegiatan ekonomi produktif dengan lahan untuk konservasi. Menentukan sector yang dapat diunggulkan sering dianggap sebagai langkah untuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga dapat diartikan sebagai wujud kemampuan suatu sector dalam menghasilkan nilai tambah, bahkan termasuk kemampuan kompetisinya dengan daerah lain. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pembangunan ekonomi dalam perspektif potensi sumber daya, terutama potensi sumber daya alam yang terbatas di satu sisi dan potensi sumber daya manusia yang semakin berkembang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan daerah ditentukan oleh banyak factor yang mencakup; sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi industry, teknologi, luas daerah, pasar ekspor, situasi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat, dan berbagai bantuan pembangunan. Dengan berubahnya paradigma pembangunan ekonomi daerah, maka konsep (pendekatan) komponen pembangunan ekonomi juga mengalami reformulasi. Komponen tersebut adalah: lokalitas, basis usaha dan ekonomi, sumberdaya pengerjaan, sumberdaya komunitas (Arsyad, 2016: 143). Kebijakan pembangunan pada 2022 diarahkan pada keunggulan kompetitif wilayah untuk meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Selain percepatan pemulihan dampak pandemi, pemerintah juga akan melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi (www.merdeka.com).

Strategi pembangunan berkelanjutan dikelompokkan pada 4 area: pelayanan publik, pengelolaan limbah, pengelolaan sumber daya lahan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya lahan mencakup: penatagunaan sumber daya lahan, pengelolaan hutan, pengembangan pertanian dan perdesaan, dan pengelolaan sumber

daya air (Hadiwijoyo, 2020). Apapun strategi pembangunan ekonominya, tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah (Arsyad, 2016: 148)

1. Membangun pekerjaan yang berkualitas
2. Mencapai stabilitas ekonomi lokal
3. Membangun dasar ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam

Untuk mendesain strategi pembangunan yang pas, langkah utama adalah menganalisis dasar sosioekonomi dan kapasitas pembangunan daerah. Namun, dengan pembangunan berkelanjutan, mengejar produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan lingkungan.

Potensi yang besar menjadi kekuatan untuk peningkatan produktivitas (memungkinkan untuk surplus) yang dapat digunakan untuk mencapai pemerataan dan menjaga kesinambungan pembangunan. Pembangunan ekonomi daerah juga mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja, identifikasi pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan perusahaan-perusahaan baru, sehingga kebijakan pembangunan berdasar pada kekhasan daerah (*endogenous development*) yang memanfaatkan potensi SDM, kelembagaan dan sumber daya fisik (Rajab, dkk, 2011: 5).

Kinerja pembangunan ekonomi tidak saja dilihat dari pertumbuhan ekonomi, transformasi ekonomi, pendapatan per kapita, angka kemiskinan tetapi juga dari sisi pengelolaan sumberdaya/inputnya seperti tenagakerja. Penyerapan tenaga kerja menjadi satu indikator penting dalam pembangunan karena berkaitan dengan kesejahteraan penduduk.

Kawasan Konservasi dan Potensi Sumber Daya Ekonomi

Potensi sumberdaya ekonomi pada suatu perekonomian menjadi factor utama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki tidak berarti menjadi penghambat dalam pembangunan. Justru kondisi keterbatasan tersebut menjadi tantangan perencanaan untuk meningkatkan kinerja pembangunan. Tidak saja karena *factor endowment* yang terbatas, tetapi terkadang keterbatasan yang ada karena peraturan

pemerintah yang membuat sumberdaya semakin langka, seperti penetapan suatu wilayah/daerah/kawasan sebagai kawasan konservasi.

Kawasan konservasi ditetapkan melalui penetapan pemerintah dalam bentuk peraturan sesuai perundangan yang berlaku. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 membagi kawasan hutan ke dalam tiga kawasan utama: hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Klasifikasi kawasan konservasi menurut SK Dirjen PHPA No 129, Tahun 1996 adalah:

1. Kawasan Suaka Alam (KSA): cagar alam dan suaka marga satwa
2. Kawasan Pelestarian Alam (KPA): taman nasional, taman hutan raya, dan wisata alam
3. Taman Buru
4. Hutan Lindung

Kawasan konservasi pada dasarnya adalah sumber daya alam potensial untuk dikembangkan agar memiliki nilai tambah. Banyak daerah, memilih kawasan konservasi sebagai destinasi wisata. Sektor Pariwisata sering dianggap sebagai sector pengungkit.

Pembangunan Kabupaten Konservasi dan SDGs.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan (SDGs) menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam. Pembangunan ekonomi harus berkelanjutan karena 3 hal: alasan moral, alasan ekologi, keanekaragaman hayati, serta alasan ekonomi. Alasan ekonomi masih menjadi perdebatan, apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah memenuhi kriteria berkelanjutan, karena kompleksitasnya, namun sering dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi (*intergeneration welfare maximization*)(Hadiwijoyo. 2020:173).

Angi, Kresno, dan Petrus .2009, menyimpulkan bahwa penetapan suatu daerah menjadi kawasan konservasi karena merupakan inti pembangunan berkelanjutan. Penetapan kawasan konservasi diinisiasi oleh *stakeholder*, karena Kabupaten Malinau tidak memiliki keunggulan dan daya saing yang baik di sector jasa dan ekonomi dan perdagangan dibanding kabupaten lain. Potensi hutan yang luas dengan kondisi masih baik dan kawasan TNKM yang menjadi “jantung Borneo” menjadi keunggulan dan kebanggaan masyarakat.

Kiptiah, 2015, melihat bahwa potensi sumber daya dalam pembangunan wilayah sering dihadapkan pada kendala dalam pemanfaatannya. Ada pertentangan kepentingan antara konservasi sumberdaya dan pengembangan wilayah. Oleh karena itu, strategi optimalisasi sumberdaya untuk pengembangan wilayah sangat penting. Dengan strategi yang jitu dan dinamis, kebijakan konservasi yang menjadi bagian integral dalam pembangunan berkelanjutan dapat terus dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, potensi SDM yang memiliki keahlian dalam tata ruang dan wilayah dibarengi dengan teknologi sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Nitiwijaya. 2015, menyatakan bahwa pengelolaan kawasan konservasi sejalan dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan program pembangunan berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya masih terkendala oleh kurang memadainya institusi pengelola, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, serta dukungan pendanaan dalam pengelolaannya. Selain itu, pemahaman birokrat tentang konsep konservasi perlu ditingkatkan untuk menghindari alih fungsi lahan.

Penelitian ini menganalisis pembangunan ekonomi Kabupaten Lebong yang merupakan kabupaten konservasi. Kinerja pembangunan ekonomi tidak saja dilihat dari pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan tetapi juga melihat dari sisi ketenagakerjaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder runtut (*time series*) dari tahun 2014 sampai tahun 2020 yang diperoleh dari BPS. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, dan mencakup data PDRB harga konstan 2010, ketenagakerjaan, dan beberapa data pendukung lainnya. Metode analisis menggunakan analisis regional (*Dynamic Location Quotient dan Shift Share Analysis*) untuk menentukan sektor unggulan, baik dari sisi output maupun input (tenaga kerja) serta analisis statistik deskriptif.

Metode DLQ ini menggunakan rumus :

$$DLQ_{ij} = \left[\frac{(1 + g_{ij}) / (1 + g_j)}{(1 + G_i) / (1 + G)} \right]^t = \frac{IPPS_{ij}}{IPPS_i}$$

Keterangan :

DLQ adalah koefisien DLQ di Sektor i di Kabupaten Lebong

g_{ij} adalah rata-rata pertumbuhan PDRB sektor i di Kabupaten Lebong

g_j adalah rata-rata pertumbuhan total PDRB di Kabupaten Lebong

G_i adalah rata-rata pertumbuhan PDRB sektor i di Provinsi Bengkulu

G adalah rata-rata pertumbuhan PDRB di Provinsi Bengkulu

t adalah waktu (tahun)

Jika nilai $DLQ=1$ berarti potensi perkembangan sektor (i) daerah (j) adalah sebanding dengan potensi perkembangan sector daerah lain di daerah himpunan.

Jika $DLQ < 1$, berarti potensi perkembangan sektor (i) daerah (j) lebih rendah dibandingkan dengan potensi perkembangan sektor daerah lain di daerah himpunannya.

Jika $DLQ > 1$ berarti perkembangan sektor (i) daerah (j) lebih cepat dibandingkan potensi perkembangan sektor daerah lain di daerah himpunannya, jadi pada masa yang akan datang kalau keadaan tidak berubah maka sektor tersebut dapat diharapkan sebagai sektor yang unggul dalam persaingan (Badjuri & Yuwono, 2002).

Sementara untuk melihat tingkat daya saing sektoral, terdapat tiga komponen pertumbuhan yang dapat dihitung dengan menggunakan analisis SS ini, yaitu pengaruh pangsa (*share*), pengaruh bauran (*proportional shift*) dan pengaruh keunggulan (*differential shift*).

Adapun Formula *Shift Share Analysis* yaitu:

Perubahan total kegiatan ekonomi dapat dirumuskan

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

N_{ij} merupakan pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah referensi ($N_{ij} = V_{ij} \times r_n$)

M_{ij} merupakan pergeseran proporsional atau pengaruh bauran ndustry ($M_{ij} = V_{ij} (r_{in} - r_n)$)

C_{ij} merupakan pengaruh keunggulan kompetitif ($C_{ij} = V_{ij} (r_{ij} - r_{in})$)

dimana:

V_{ij} = output sektor i daerah j

V_{in} = output sektor i propinsi

r_{ij} = laju pertumbuhan sektor i di daerah j

r_{in} = laju pertumbuhan sektor i propinsi

r_n = laju pertumbuhan ekonomi propinsi

Analisis *Shift-Share* yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan sektor dan sub sektor yang memiliki keunggulan kompetitif. Komponen ini merupakan salah satu komponen yang tercakup pada analisis *shift-share* (komponen C).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumberdaya Ekonomi Kabupaten Lebong

Kabupaten Lebong sebagai kabupaten konservasi dicanangkan sebagai kabupaten Konservasi pada tahun 2008 dengan potensi kawasan hutan mencapai 134.000 Ha atau 70 % dari luas kabupaten pada saat itu. Konsekuensinya harus mempertahankan kawasan hutannya yang ada saat itu agar tidak dialih fungsikan untuk kegiatan budidaya, setidaknya dalam 2 tahun sesuai Moratorium Oslo, tanggal 26 Mei 2010. (<http://sikpkp.ciptakarya.pu.go.id>). Dengan hanya sekitar 30%, Kabupaten Lebong harus mengelola lahan untuk menghasilkan nilai tambah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sekalipun masih belum optimal. Kabupaten Lebong ikut program *Carbon Conservation*. Konsep *carbon credit* merupakan salah satu upaya untuk mendukung program kelestarian hutan di kabupaten Lebong, dengan konsep mendatangkan devisa tanpa menebang pohon satu batangpun.

Pengelolaan kawasan konservasi memerlukan SDM yang terampil (www.lebongkab.go.id). Selain program tersebut, pembangunan sektor pariwisata berbasis alam terus digali dan dikembangkan. Saat ini, banyak pemerintah daerah terlibat dalam bisnis pariwisata secara langsung. Pemerintah memainkan peran penting pembangunan pariwisata. Peran tersebut adalah menjalankan fungsi secara politik maupun secara kewirausahaan. Pembangunan pariwisata daerah memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta (Bulilan, 2021).

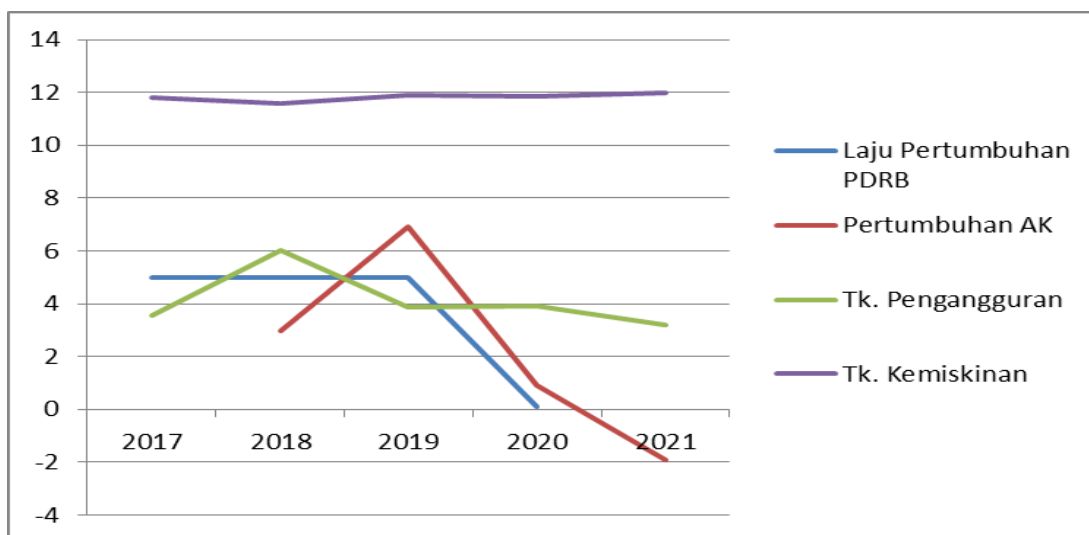
Penduduk dan Kondisi Ketenagakerjaan

Penduduk suatu daerah dapat menjadi modal atau menjadi penghambat pembangunan ekonomi tergantung pada beberapa karakteristik yang ada. Dengan jumlah penduduk 108.028 jiwa (paling kecil di Provinsi Bengkulu) pada tahun 2020 memiliki jumlah angkatan kerja sebanyak 65.400 jiwa (60,54%) dengan tingkat pengangguran 3,92%. Untuk menunjang pembangunan ekonomi, pembangunan manusia memberikan peran

strategis. Dengan IPM 67,01 pada tahun 2020, Kabupaten Lebong menduduki peringkat 8 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu (Kabupaten Lebong Dalam Angka, 2021).

Indikator Pembangunan Daerah Ekonomi

Kinerja Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya dilihat dari perkembangan beberapa indikator ekonomi umum di daerah itu sendiri, tetapi juga sering dilihat posisinya dibanding daerah lainnya ataupun kinerja dengan wilayah di atasnya. Kabupaten Lebong sejauh ini masih menempati posisi terakhir dalam kontribusi PDRB Provinsi Bengkulu (Tabel 1). Sekalipun dari pertumbuhan PDRB, tidak jauh beda dengan pertumbuhan Provinsi. Bahkan pada tahun 2020, saat pandemic, Kabupaten Lebong masih tumbuh 0,1% ketika beberapa kabupaten/kota mengalami kontraksi (www.bps.go.id).



Gambar 1. Beberapa Indikator Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lebong

Sumber: Kabupaten Lebong Dalam Angka 2021, diolah.

Dengan laju pertumbuhan PDRB sebelum pandemic berkisar 5%, tingkat kemiskinan sangat tinggi, hampir 12% (Gambar 1). Sekalipun Gini Ratio tergolong rendah, 0,29 dalam lima tahun terakhir, namun PDRB per kapita sebesar Rp.17.962,- pada Tahun 2020 yang menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp.18.219,- (turun 1,41%). Selain itu, tingkat kemiskinan juga meningkat dari 11,77% pada 2019 menjadi 11,85% pada tahun 2020 (BPS. 2021. Kabupaten Lebong Dalam Angka.). Tentu hal ini juga dampak pandemic covid-19.

Pembangunan Ekonomi berbasis Sektor Unggulan

Menelusuri kegiatan ekonomi secara sektoral, tidak saja melihat outputnya (PDRB), tetapi juga inputnya (Tenaga Kerja) dapat memperoleh sektor yang diunggulkan. Sektor unggulan dianggap mampu membawa kemajuan suatu daerah. Kabupaten Lebong yang sebagian besar lahannya adalah kawasan konservasi (sekali pun luas wilayahnya menempati urutan ketiga, setelah Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara), tentu tidak boleh banyak mengandalkan lahan dalam pembangunannya. Dengan rata-rata lama sekolah sekitar 7,9 yang menjadikan posisi Kabupaten Lebong terendah ketiga di Provinsi Bengkulu (www.bps.go.id) tentu berdampak pada produktivitasnya.

Tabel 2. Sektor Unggulan dari sisi PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Lebong Tahun 2014-2019

Kode	Sektor Unggulan berdasarkan PDRB	Kategori	Sektor Unggulan berdasarkan Penyerapan Tenaga Kerja	Kategori
C	Industri Pengolahan	sangat unggul	G Perdagangan Besar dan Eceran	unggul
F	Konstruksi	unggul	H Transportasi dan Pergudangan	unggul
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	sangat unggul	M,N Jasa Perusahaan	unggul
L	Real Estate	sangat unggul	O Administrasi pemerintahan	unggul
			Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	unggul

Sumber: Hasil Perhitungan DLQ dan SSA

Dari tabel 2 terlihat bahwa Kabupaten Lebong memiliki beberapa sektor yang dapat diunggulkan. Jika diamati, kemampuan sektor menghasilkan nilai tambah berbeda dengan kemampuan sektor dalam penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut memberikan tantangan bagi pemerintah daerah untuk memilih prioritas pembangunan ekonominya. Prioritas tujuan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi tinggi dapat mengandalkan Sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Sektor Real Estate. Empat sektor tersebut memiliki keunggulan tidak saja dari produktivitasnya tetapi juga dari daya saingnya di tingkat Provinsi Bengkulu. Namun, jika prioritas tujuan pembangunan ekonomi untuk penyerapan tenaga kerja, maka sektor-sektor yang bisa diandalkan berbeda dengan empat sektor sebelumnya. Sektor yang mampu menyerap tenaga kerja banyak adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Administrasi Pemerintahan

serta Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Tidak ada satu sektorpun yang unggul menurut PDRB dan tenaga kerja.

Kabupaten Lebong menjadi satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki sektor unggulan jika basis penghitungannya dari PDRB dan tenaga kerja. Beberapa kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu bahkan memiliki sektor unggulan lebih dari satu (Tabel 3). Dua pendekatan penghitungan ini untuk melihat kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah. Ketika suatu sektor unggul di kedua pendekatan, dapat diartikan bahwa kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah tinggi (produktivitasnya tinggi). Hal ini menggambarkan kualitas tenaga kerja yang terserap di sektor tersebut baik.

Tabel 3. Sektor Unggulan Kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu menurut PDRB dan Tenaga Kerja 2014-2019

Kabupaten Pemekaran	Sektor Unggulan Menurut PDRB dan Tenaga Kerja
Kaur	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Seluma	Industri Pengolahan
Mukomuko	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jasa Keuangan dan Asuransi
Bengkulu Tengah	Pertambangan dan penggalian Industri Pengolahan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Kepahiang	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan
Lebong	Tidak Ada

Sumber: hasil perhitungan DLQ dan SSA

KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi Kabupaten Lebong tidak mengandalkan sektor primer untuk peningkatan kesejahteraan penduduknya. Dengan penetapan sebagai kabupaten konservasi, Lebong terus berupaya melihat potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan nilai tambah, terutama tenaga kerja sekalipun rata-rata tingkat pendidikan hanya setara SMP. Sektor-sektor unggulan dalam penyerapan tenaga kerja kebanyakan sektor yang tidak membutuhkan keahlian. Produktivitas tinggi dihasilkan dari sektor sekunder dan tersier yang berbeda dengan sektor unggulan dari tenaga kerja.

Sementara dari potensi lahan, sebagai kabupaten konservasi, Kabupaten Lebong mengikuti program konservasi karbon, selain menggali dan mengembangkan wisata berbasis alam.

KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Keterbatasan penelitian ini adalah tidak sampai pada penetapan strategi pembangunan untuk daerah dengan beberapa kendala sumber daya alam (lahan) pembangunan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perencanaan pembangunan yang partisipatif, yang melibatkan seluruh *stakeholder* untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini untuk meminimalkan konflik kepentingan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada dan menentukan strategi pembangunan terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Angi, E.M., Kresno.DS., & Petrus. G. (2009). *Kebijakan Kabupaten Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat. Studi Kasus Kabupaten Malinau*. www.tropenbos.org.
- Arsyad, L. (2016). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Ed. Ketiga. Yogyakarta: BPFPE.
- Bulilan, C. M. R. (2021). From Governing to Selling Tourism: Changing Role of Local Government in the Tourism Development of Bohol, Philippines. *Southeast Asian Studies*. 10(2). 273-293.
- BPS. (2021). *Kabupaten Lebong Dalam Angka 2021*.
- BPS. (2021). *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2021*.
- BPS. (2019). *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2019*.
- Hadiwijoyo, S.S., & Fahima, D. A. (2020). *Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis SDGs*. Depok: Rajawali Pers.
- Kiptiah, M. (2015). Pengembangan Wilayah dalam Perspektif Potensi Sumber Daya. *Jurnal Humaniora Tehnologi*. 1(1). 26-34.
- Nitiwijaya, Y. S. (2015). Perspektif Birokrat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kelestarian Lingkungan di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Agrijati*. 28 (1). 189-201.
- Rajab, U.S., H Martha, I., Wasiaturrahma., & Hamzah. A. (2011). *Integrasi, Sinergi dan Terobosan Pembangunan Daerah*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- www.merdeka.com. *Pemerataan Ekonomi Daerah Jadi Fokus Bappenas di 2022*.
- <http://lebongkab.go.id>. Selayang Pandang.
- <http://sikpkp.ciptakarya.pu.go.id>. Record 7 Pengembangan Kawasan Pemukiman.
- Badjuri, A., & Yuwono, T. (2002). *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.